

PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP HARTA PENINGGALAN YANG DIGANTIKAN KEDUDUKANNYA OLEH AHLI WARIS

¹Leonora Manuputty, ²Ade Hari Siswanto

¹Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

²Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

[¹Leonoramanuputty28@gmail.com](mailto:Leonoramanuputty28@gmail.com)

[²Siswanto@harisiswantolaw.com](mailto:Siswanto@harisiswantolaw.com)

ABSTRAK

Dalam dunia bisnis, kegiatan utang piutang merupakan sesuatu hal yang biasa terjadi. Utang piutang biasanya muncul ketika salah satu pihak membutuhkan dana yang lebih namun ia tidak memilikinya. Sehingga pihak tersebut harus meminjam kepada pihak lain. Dalam utang piutang dikenal adanya debitor dan kreditor, yang mana debitor dapat dikatakan sebagai orang yang berutang kepada pihak lain, sedangkan yang dimaksud dengan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang terhadap debitor. Hubungan hukum antara debitor dan kreditor akan berjalan baik-baik saja apabila dalam pelaksanaan utang piutang para pihak dapat menerima haknya dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah disepakati di awal. Namun seringkali terjadi permasalahan di antara debitor dan kreditor. Salah satu permasalahannya adalah apabila debitor tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi utang kepada kreditor. Permasalahan lain yang mungkin muncul adalah apabila debitor meninggal namun ia belum sempat untuk melunasi utangnya kepada kreditor. Karena kreditor tidak ingin dirugikan, pasti ia akan menuntut pelunasan utang dari pihak keluarga atau ahli waris debitor. Dari sinilah muncul adanya permohonan PKPU terhadap ahli waris dari debitor yang sudah meninggal. Namun, karena ahli waris dari debitor menolak untuk menerima warisan yang diturunkan oleh debitor kepadanya, maka ia tidak dapat dibebankan atas pelunasan utang yang dilakukan oleh debitor kepada kreditor semasa hidupnya. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian normatif. Selain itu, pendekatan yang dilakukan adalah penelitian terhadap perundang-undangan.

Kata kunci : *Ahli Waris, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Warisan*

ABSTRACT

In the business world, debt receivable activities are common. Receivables usually arise when one of the parties needs more funds but he does not have them. So the party has to borrow to other pihal. In debt receivables are known to be debtors and creditors, which the debtor can be said to be the person who owes to the other party, while the creditor is the one who has receivables against the debtor. The legal relationship between the debtor and the creditor will run fine if in the implementation of receivables debts the parties can receive their rights and carry out their obligations in accordance with what was agreed at the beginning. But there are often problems between debtors and creditors. One of the problems is if the debtor does not perform his obligation to pay off the debt to the creditor. Another problem that may arise is if the debtor dies but he has not had time to pay off his debt to creditors. Because the creditor does not want to be harmed, surely he will demand the repayment of debts from the family or the heirs of the debtor. From here comes the application of PKPU against the heirs of deceased debtors. However, because the heirs of the debtor refuse to accept the inheritance handed down by the debtor to him, he cannot be charged for the repayment of debts made by the debtor to the creditor during his lifetime. In this study, normative research methods were used. In addition, the approach is research on legislation.

Keywords : *Heirs, Inheritance, Suspension of Payment*